



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	v
INTISARI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Pertanyaan Penelitian	13
I.3 Tujuan Penelitian	14
I.4 Manfaat Penelitian	14
II. LANDASAN KONSEPTUAL	17
II.1 Dinamika Formulasi Kebijakan Publik dan Perkembangan Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17
A. Dinamika Formulasi Kebijakan Publik	17
B. Perkembangan Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22
II.2 Keberlanjutan Wilayah Pesisir dan Ekonomi Politik	28
A. Aktor Kebijakan	36
B. Kontestasi: Pengaruh dari berbagai Tujuan dan Kepentingan	37
C. Konteks dalam Formulasi Kebijakan	39
II.3 Kerangka Analisis	39
III. METODE PENELITIAN	41
III.1 Desain Penelitian	41
III.2 Konteks Penelitian	42
III.3 Jenis dan Sumber Data	42
III.4 Teknik Pengumpulan Data	44
III.5 Informan	45
III.6 Teknik Analisis Data	46
III.7 Teknik Validasi Data	48
IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	49
IV.1 Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	49



A.	Kondisi Geografis	49
B.	Potensi dan Kondisi Sumber Daya Hayati dan Non Hayati.....	50
C.	Potensi Pemanfaatan Sumberdaya Laut dan Pesisir	51
D.	Kondisi Lingkungan.....	51
E.	Kondisi Perekonomian.....	53
IV.2	Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	54
V.	Dinamika Formulasi Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau.....	56
V.1	Permasalahan: Ketidakefektifan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir untuk Pengalokasian dan Pemanfaatan Sumberdaya yang Berkelanjutan	56
V.2	Konsultasi, Koreksi, Interupsi, Gratifikasi, dan Pilkada: Proses untuk menetapkan kebijakan RZWPK Provinsi Kepulauan Riau	64
V.3	Pengesahan Bukan Penetapan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau.....	75
VI.	EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN KEBIJAKAN RZWP3K PROVINSI KEPULAUAN RIAU	80
VI.1	Multi Aktor dalam Kebijakan RZWP3K Provinsi Kepulauan Riau	80
VI.2	Kontestasi Kepentingan terhadap Tujuan dalam Kebijakan RZWP3K.....	83
VI.3	Situasi Perekonomian, Konflik Kelembagaan, dan Inkonsistensi Peraturan sebagai Konteks dalam Kebijakan RZWP3K Kepri	88
VI.4	Kontestasi Kepentingan Multiaktor dan Konteks hingga Komitmen terhadap Keberlanjutan Pesisir. Bagaimana Komitmen Terhambat?	94
VII.	PENUTUP	96
VII.1	Kesimpulan.....	96
VII.2	Saran	98
VII.3	Limitasi dan Peluang Pengembangan Penelitian.....	99
	DAFTAR PUSTAKA.....	100